



DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan, Sumbangkan Kompetensi,
Berani Mengambil Inisiatif, Kolaborasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)** Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)** Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2024

**Kepala Dinas Bina Marga, Cipta
Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat,**



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TA 2023

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI	6
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1.5. DASAR HUKUM	9
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	11
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	11
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	Error! Bookmark not defined.
3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	Error! Bookmark not defined.
4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing- Masing Program/Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	58
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	59
1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD	59
2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ.....	63
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD	67
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	73

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	75
4.3 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	75
4.4 HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	78
BAB IV PENUTUP	80

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya mewujudkan visi Gubernur Sumatera Barat yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”***.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki peran strategis sebagai salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 3 tahun 2020 dijelaskan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas pokok yaitu membantu Gubernur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang menjalankan fungsi untuk mengerjakan:

- a. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

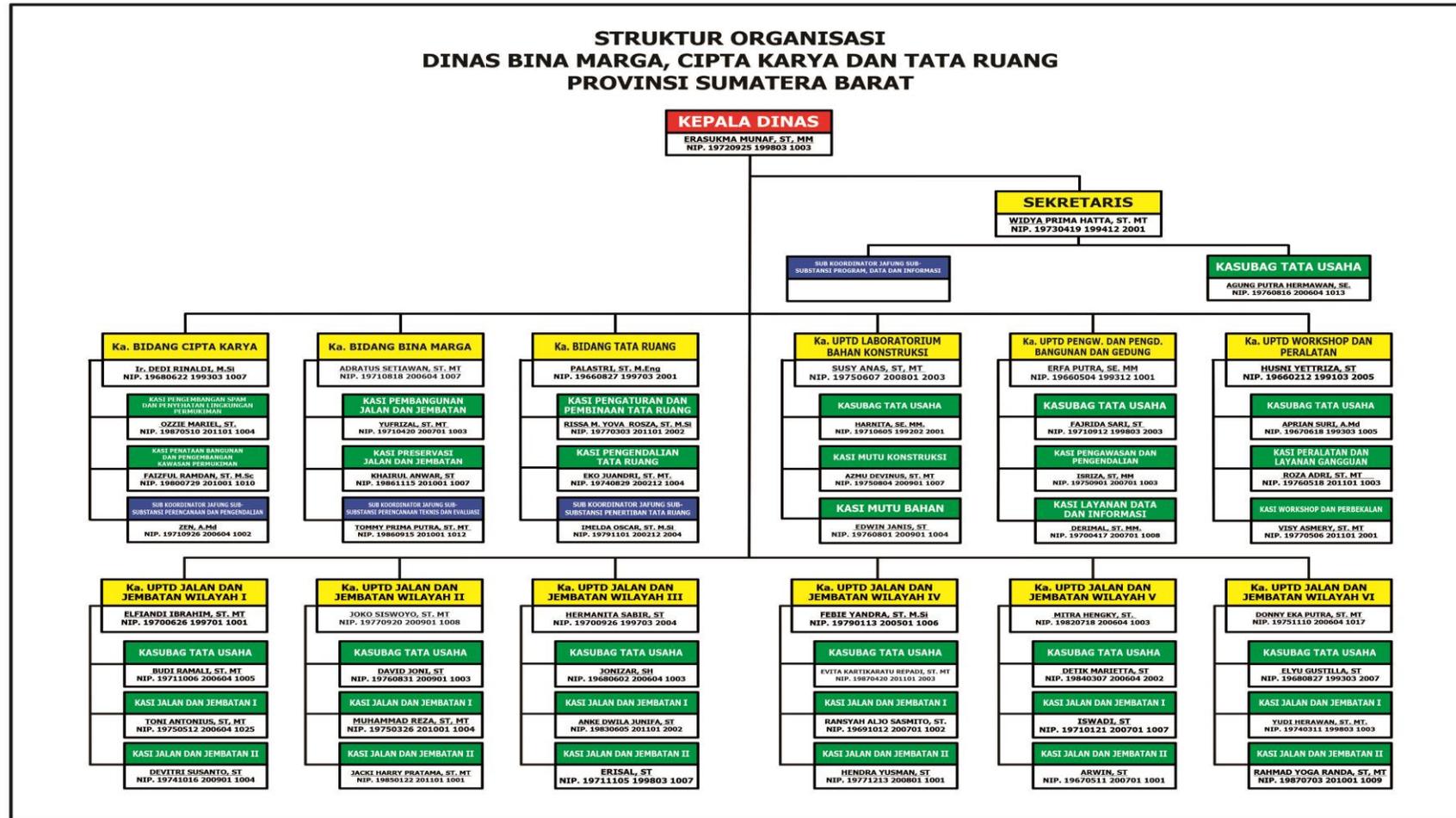
Menurut Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 50 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari 4 (empat) bidang dan 9 (sembilan) UPTD sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2.2. Substansi Program Data dan Informasi
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Substansi Perencanaan dan Pengendalian

- 4.2. Seksi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 4.3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Substansi Penertiban Tata Ruang
 - 5.2. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
 - 5.3. Seksi Pengendalian Tata Ruang
6. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Mutu Bahan
7. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Pengawasan / Pengendalian Bangunan
 - 7.3. Seksi Layanan Data dan Informasi
8. UPTD Workshop dan Peralatan
 - 8.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 8.2. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
 - 8.3. Seksi Workshop dan Perbekalan
9. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I
 - 9.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 9.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 9.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
10. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II
 - 10.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 10.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 10.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
11. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III
 - 11.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 11.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 11.3. Seksi Jalan dan Jembatan II

12. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV
 - 12.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 12.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 12.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
13. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V
 - 13.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 13.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 13.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
14. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI
 - 14.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 14.2. Seksi Jalan dan Jembatan I
 - 14.3. Seksi Jalan dan Jembatan II
15. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas BMCKTR Tahun 2023

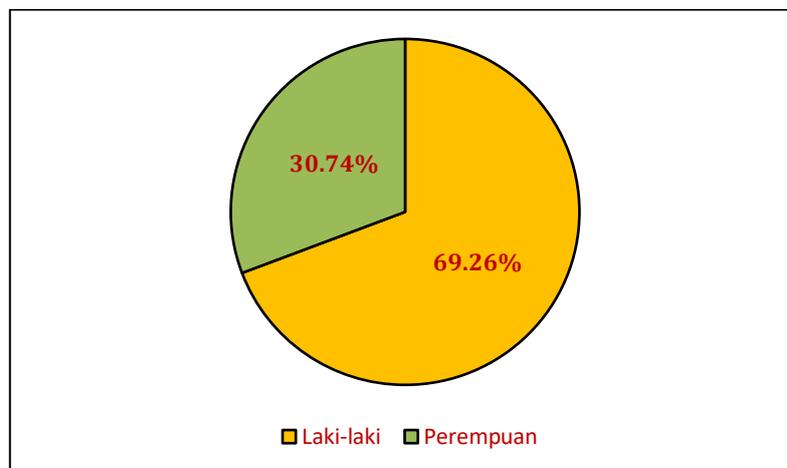
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2023 adalah **309 (Tiga Ratus Sembilan) orang** Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan 7 orang diantaranya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	214 orang	69.26 %
Perempuan	95 orang	30.74 %



Gambar 1. 2

Jumlah Pegawai Dinas BMCKTR Tahun 2023

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongannya ditampilkan pada **Tabel 1.2** dan **Tabel 1.3**.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	2		2
SLTP Sederajat	5		5
SLTA Sederajat	71	10	81
DIII	24	12	36
DIV	1		1
S1	78	49	127
S2	33	24	57
Jumlah	214	95	309

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1a			
1b			
1c			
1d	2		2
2a	1		1
2b	9		9
2c	15	1	16
2d	32	5	37
3a	48	21	69
3b	41	17	58
3c	21	13	34
3d	28	27	55
4a	11	5	16

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
4b	2	2	4
4c	1		1
4d			
4e			
PPPK	3	4	7
Jumlah	214	95	309

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan jembatan, air minum, sanitasi, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penghubung antar daerah terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Adapun untuk peran strategis Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang adalah pelaksanaan pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan strategis

lainnya. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu Lanjutan *Pembangunan Main Stadium* dan *Pembangunan Gedung Kebudayaan*.

Dari segi Penataan Ruang peran strategis yang perlu diwujudkan ialah pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2023, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan SIMTARU, Pemanfaatan Geoportal Mandiri Simpul Jaringan *One Map One Policy*, Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR, Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah.

Adapun program-program Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu ***Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan & Berkelanjutan***. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas BMCKTR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 335.188.071.338,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 316.438.771.676,- atau 94,41 % dan realisasi fisik sebesar 98,70 %. Urusan tersebut dilaksanakan melalui 9 Program, 19 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	83,75 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	73,70	88,50	120,08 %
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Mantap	77,00 %	67,99 %	88,30 %
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Akses Air Minum Layak	84,00 %	85,58 %	101,88 %

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Air Minum				
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Akses Sanitasi Layak	84,00 %	84,95 %	101,13 %
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase bangunan strategis terbangun	55,55 %	6,00 %	10,80 %
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase bangunan strategis terbangun	40,00 %	2,50 %	6,25 %
7.	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	87,00 %	88,00 %	101,15 %

2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : B) dengan capaian kinerja : 83,75 %

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outcome : Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100 %, realisasi 100 % dan capaian sebesar 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output: Tersusunnya 2 dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output: Tersedianya 1 dokumen yaitu RKA SKPD
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output: Tersedianya 1 paket untuk komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output: Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 7 paket (termasuk pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output: Tersedianya 1 paket untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output: Tersedianya 12 dokumen terkait bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output: Terselenggaranya 84 Laporan terkait penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (termasuk pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI)

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output: Tersusunnya 1 dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi, dengan indikator kinerja :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target Kinerja : 73,70) (Realisasi Kinerja : 88,50) dengan capaian kinerja : 120,08 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outcome : Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan target 100 %, realisasi 100 % dan capaian sebesar 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN sebanyak 350 orang/bulan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output: Tersusunnya 13 laporan berupa laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output: Tersedianya 1 dokumen berupa laporan penatausahaan barang milik daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
 - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output: Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk 10 orang
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Mebel, dengan output: Terlaksananya pengadaan mebel sebanyak 1 paket untuk pengadaan meja, kursi dan lemari
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Tersediannya 1 set unit peralatan dan mesin Lainnya untuk pengadaan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dan Belanja Modal Alat Kantor lainnya (Scanner, PC, Laptop, dll)
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output: Tersediannya 73 laporan penyediaan jasa surat-menyerurat (termasuk pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output: Tersediannya 1 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output: Tersediannya tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 78 orang, Tersediannya 72 laporan terkait penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output: Terealisasinya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 20 unit

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 20 unit
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 unit

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

c. Sasaran III : Meningkatnya Kemantapan Jalan, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Jalan Mantap (Target Kinerja : 77,00 %) (Realisasi Kinerja : 67,99 %) dengan capaian kinerja : 88,30 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan dengan outcome : Rasio Kemantapan Jalan dengan target 77 %, realisasi 67,99 % dan capaian sebesar 88,30 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Jalan Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan output: Tersusunnya 9 dokumen lingkungan dan dokumen pendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dari Paket Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P.078), Paket Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) Segmen III, Paket Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Sasak - Maligi (P.033.2), Paket Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Sicincin-Kurai Taji (P.028), Paket Penyusunan Dokumen UKL/UPL/DPLH Jalan Provinsi, Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas Jalan Provinsi Paket I, Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi, Administrasi Proyek Swakelola Pengurusan

- PIPIB dan IPPKH Kawasan Hutan Jalan Provinsi dan Swakelola Pengurusan PIPPIB dan IPPKH Kawasan Hutan Jalan Provinsi, Tersusunnya 1 dokumen dari paket pekerjaan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan, tersusunnya 1 dokumen perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dari paket pekerjaan Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga, tersedianya 2 dokumen study fungsi dan studi kelayakan penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dari paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Jalan Malalak-Sei Batang (Agam) dan Swakelola Study Fungsi Jaringan dan Pengembangan Jalan Provinsi
- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dengan output: Tersusunnya 1 dokumen untuk Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol, Tersedianya penyiapan Lahan Infrastruktur bidang ke PU an Provinsi (Koneksi ke Kawasan Strategis) seluas 0,25 Ha, luasan penyiapan Lahan untuk Infrastruktur bidang ke PU an Provinsi sebesar 0,35 Ha
 - Pengelolaan Leger Jalan, dengan output: Tersusunnya 1 dokumen pengelolaan leger jalan provinsi dari Paket Penyusunan Leger Jalan Provinsi
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan output: Tersusunnya 2 dokumen survey PKRMS/BMS Provinsi dari paket Updating PKRMS/BMS Jalan Provinsi Tahun 2023
 - Pembangunan Jalan, dengan output: Tersusunnya 4 dokumen pengawasan pembangunan Jalan pada ruas jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) (DAK), ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket I, ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket II, dan ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086), Tersusunnya 1 dokumen RPP PKS Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073), Terbangunnya Jalan sepanjang 7.255 Km pada Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) (Longsegment DAK) 2.305 Km, Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang

- (P.073) paket I 1.6 Km, Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket II 0.35 Km, Ruas Jalan Surantiah - Kayu Aro – Langgai (P.086) 3 Km
- Pelebaran Jalan Menuju Standar, dengan output: Tersusunnya 5 Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Provinsi pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025), Ruas Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) DAK, Ruas Palembang Cs, Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090), dan Ruas Jalan Simpang Ganting Payo - Bts. Tanah Datar - Sumani (P.092), Terlaksananya Pelebaran Jalan menuju standar sepanjang 22.3 Km pada Ruas Simp. Ganting Payo - Bts. Tanah Datar - Sumani (P.092) 0.5 Km, Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) 0.7 Km, Ruas Jalan Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) (Longsegment DAK) 20 Km, Ruas Jalan Palembang Cs 0.7 Km, dan Ruas Jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090) 0.4 Km
 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Provinsi pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068), Terlaksananya Pelebaran Dengan Menambah Lajur sepanjang 0.873 Km pada Ruas Kubu Kerambil - Batusangkar (P.035) 0.14 Km dan Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068) 0.733 Km
 - Rekonstruksi Jalan, dengan output: Tersusunnya 6 Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) (Longsegment DAK), ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076), ruas Purus - BIM Cs, ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078), ruas Singkarak - Arian - Tj.Balit (P.093) (Longsegment DAK), dan ruas Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040), Terekonstruksinya Jalan Provinsi sepanjang 71.812 Km pada Ruas Jalan Baso - Batusangkar (P.035) 0.1 Km, Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) (Longsegment DAK) 30.6 Km, Ruas Jalan Jalan Tanjung Ampalu - Sijunjung (P.008) 0.064 Km,

- Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) 1 Km, Ruas Jalan Purus - BIM CS 0.826 Km, Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078) 0.222 Km, Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj.Balit (P.093) (Longsegment DAK) 38 Km, dan Ruas Jalan Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040) 1 Km
- Rehabilitasi Jalan, dengan output: Tersusunnya 4 Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan dari Paket Perubahan DAU Peruntukan, Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072), Ruas Rao - Rokan (P.095) DAK, dan Ruas Sicincin - Kurai Taji (P.028) DAK, Terehabilitasinya Jalan Provinsi sepanjang 48.05 Km pada Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072) 0.9 Km, Ruas Rao - Rokan (P.095) (Longsegment DAK) 30 Km, Ruas Sicincin - Kurai Taji (P.028) (Longsegment DAK), 16.95 Km, dan Ruas Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) 200 m
 - Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan output: Terpeliharanya jalan provinsi secara berkala pada UPTD Jalan dan Jembatan Wil. I sepanjang 91,34 m, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. II sepanjang 0,385 Km, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. III sepanjang 15 Km, dan UPTD Jalan dan Jembatan Wil. VI sepanjang 15 Km
 - Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan output: Terpeliharanya jalan provinsi secara rutin pada UPTD Jalan dan Jembatan Wil. I sepanjang 263,75 Km, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. II sepanjang UPTD Jalan dan Jembatan Wil. III sepanjang 198,83 Km, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. IV sepanjang 170,7 Km, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. V sepanjang 177,88 Km, dan UPTD Jalan dan Jembatan Wil. VI sepanjang 211 Km
 - Pembangunan Jembatan, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan RS Unand, Terbangunnya Jembatan RS Unand sepanjang 90 meter
 - Penggantian Jembatan, dengan output: Tersusunnya 2 Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan

- pada Jembatan Batang Tomak (P.097) dan Jembatan Kurambik (P.025), Tergantinya Jembatan Batang Tomak (P.097) 30 Meter, Jembatan Kurambik (P.025) 6 Meter, Terlaksananya Pengadaan Armco Untuk Penggantian Jembatan sepanjang 75 m di Ruas-Ruas Jalan Provinsi
- Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan output: Terpeliharanya Jembatan secara Rutin pada UPTD Jalan dan Jembatan Wil. I sepanjang 1603 m, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. II sepanjang 1236,48 m, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. III sepanjang 859,7 m, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. IV sepanjang 804 m, UPTD Jalan dan Jembatan Wil. V sepanjang 860,5 m, dan UPTD Jalan dan Jembatan Wil. VI sepanjang 822,5 m
 - Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam, Terehabilitasi/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan akibat Bencana sepanjang 1100 meter, Terlaksananya Penanggulangan bencana/ Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan pada 7 lokasi
 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan output: Tersusunnya 12 Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi, Tersusunnya 12 Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan output: Tersusunnya 6 Dokumen Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Provinsi, Tersusunnya 13 Laporan Monitoring Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Ukur pada Laboratorium Pengujian sebanyak 9 unit, Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Ke-Puan sebanyak 20 unit

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak, dengan indikator :

- 1) Persentase Cakupan Air Minum (Target Kinerja : 84 %) (Realisasi Kinerja : 85,58 %) dengan capaian kinerja : 101,88 %

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan outcome : Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum dengan target 84 %, realisasi 85,58 %, dan capaian sebesar 101,88 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan output: Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebanyak 1 dokumen dari paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pada Kegiatan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh
- Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota, dengan output: Terfasilitasinya Kabupaten/Kota untuk Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM 9 kabupaten/kota untuk Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat dan PAMSIMAS (SPM Air Minum) dan Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

e. Sasaran V : Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Cakupan Sanitasi (Target Kinerja : 84 %) (Realisasi Kinerja : 84,95 %) dengan capaian kinerja : 101,13 %

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan outcome : TPA Regional yang dibangun dengan target 3 Lokasi, realisasi 1 Lokasi dan capaian sebesar 33,33 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi, dengan output: Tersusunnya 3 Dokumen dari paket pekerjaan Penyusunan Dokumen FS TPA Regional Padang Pariaman yaitu Dokumen Study Kelayakan, Dokling dan DED TPA Regional Padang Pariaman
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi, dengan output: Terlayannya Rumah Tangga oleh Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi sebanyak 50 rumah tangga dengan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah dengan Luas sampai dengan 1 Ha
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan outcome : Persentase cakupan layanan air limbah regional dengan target 84 %, realisasi 84,95 % dan capaian dan capaian sebesar 101,13 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, dengan Sub Kegiatan :
 - Supervis Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen terkait pelaksanaan Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dalam bentuk Pendampingan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota dan Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumbar

- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan outcome : Drainase kewenangan provinsi yang dikelola dengan target 10 Km, realisasi 243 m, dan capaian sebesar 2,43 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya, dengan output: Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya 9 unit pada paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Agus Salim dan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Khatib Sulaiman

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran V.

- f. Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis, dengan indikator kinerja :
 - 1) Presentase bangunan strategis terbangun (Target Kinerja : 55,55 %) (Realisasi Kinerja : 6,00 %) dengan capaian kinerja : 10,80 %.
 - 2) Presentase bangunan strategis terbangun (Target Kinerja : 40,00 %) (Realisasi Kinerja : 2,50 %) dengan capaian kinerja : 6,25 %).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penataan Bangunan Gedung dengan outcome : Bangunan Gedung yang dibangun dengan target 7 Unit, realisasi - , dan capaian sebesar - %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan output:

- Tersusunnya 9 Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada pakeet pekerjaan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia (Lanjutan), Pengawasan Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia (Lanjutan), DED Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan, Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan, Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan, Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung Penastani 2023, Pembangunan Infrastruktur Pendukung PENASTANI 2023, Reviu FS Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Kegiatan Operasional Main Stadium Provinsi Sumatera Barat
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan output: Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebanyak 3 unit pada paket pekerjaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan), Rehabilitasi Halaman Kantor Gubernur dan Gubernuran (Pengaspalan dan Marka) dan Rehabilitasi Ruang ASPIDUM KEJATI Sumatera Barat
 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen terkait pelaksanaan Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi, Terlaksananya Asesmen Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 50 bangunan, Tersusunnya 50 Dokumen terkait pelaksanaan Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan

- Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
- Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara, dengan output: Tersusunnya 1 Dokumen dari Hasil Pengelolaan Rumah Negara
- b) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan outcome : Kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya dengan target 7 Kawasan, realisasi - , dan capaian sebesar - %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan output: Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen dari paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Puncak Paku Kawasan Mandeh dan Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Lisensi Arsitek
 - Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota, dengan output: Tersusunnya 2 Dokumen terkait Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota, Terlaksananya Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop untuk Pembinaan Teknis pada Kabupaten/Kota sebanyak 100 orang melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaran PBG dan SLF
 - Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, dengan output: Tersusunnya 13 Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dari pelaksanaan

kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan
Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VI.

g. Sasaran VII : Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi (Target Kinerja : 87,00 %) (Realisasi Kinerja : 88 %) dengan capaian kinerja : 100,15 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan outcome : Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan target 87 %, realisasi 88 %, dan capaian sebesar 101,15 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi, dengan output: Tersusunnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Barat 1 peraturan daerah
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, dengan output: Terlaksananya pelatihan SDM kepada 60 orang di Bidang Penataan Ruang, sosialisasi KKPR kepada 60 orang, Sosialisasi Peraturan Menteri ATR BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang kepada 60 orang

- b) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi, dengan output: Tersusunnya 1 laporan dari hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi RRTR Provinsi/Kabupaten/Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota, dengan output: Tersusunnya 1 Ranperkada terkait Kawasan Danau Prioritas di Sumatera Barat
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Sistem Informasi Penataan Ruang, dengan output: Tersedianya 2 Laporan mengenai Update Data Aplikasi SIMTARU dan Update Data Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy), Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi kepada 70 orang, Tersusunnya 1 SK Gubernur terkait Pembentukan Tim Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, dengan output: Tersusunnya 1 laporan terkait Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang, Tersusunnya 1 naskah rancangan peraturan gubernur tentang pemberian insentif dan disinsentif
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, dengan output: Tersusunnya 2 Laporan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan Danau dan pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan Pantai
 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, dengan output: Tersusunnya 1 laporan terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan output: Tersusunnya 2 laporan dari hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota/Provinsi Sumatera Barat

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran VII.

3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
						Rp335,188,071,338	Rp316,438,771,677	94.41
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Rp51,028,119,878	Rp50,348,602,510	98.67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Peraturan Gubernur Sumatera Barat				Rp360,778,839	Rp344,139,593	95.39
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Rp155,047,125	Rp150,108,233	96.81
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2 Laporan	100	Rp205,731,714	Rp194,031,360	94.31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Peraturan Gubernur Sumatera Barat				Rp34,377,064,524	Rp34,071,388,115	99.11
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Poko dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	350 Orang/Bulan	350 Orang/Bulan	100	Rp33,026,487,024	Rp32,734,672,486	99.12
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		13 Laporan	13 Laporan	100	Rp1,350,577,500	Rp1,336,715,629	98.97
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp222,964,000	Rp222,761,778	99.91
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp222,964,000	Rp222,761,778	99.91

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp33,928,000	Rp31,540,101	92.96
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Rp33,928,000	Rp31,540,101	92.96
			10 orang	10 orang	100			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp2,801,488,013	Rp2,781,822,456	99.30
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp55,000,000	Rp54,931,125	99.87
			1 Paket	1 Paket	100			
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp185,000,000	Rp184,160,568	99.55
			1 Paket	1 Paket	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp17,501,600	Rp17,446,500	99.69
			1 Paket	1 Paket	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp15,000,000	Rp14,935,500	99.57
			1 Paket	1 Paket	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp12,500,000	Rp12,492,400	99.94
			1 Paket	1 Paket	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)					Rp15,000,000	Rp14,975,200	99.83
			1 Paket	1 Paket	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)					Rp12,937,500	Rp12,920,100	99.87
			1 Paket	1 Paket	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp12,000,000	Rp11,970,900	99.76
			1 Paket	1 Paket	100			
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp110,000,000	Rp109,900,639	99.91
			1 Paket	1 Paket	100			
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp30,420,000	Rp30,344,000	99.75
			12 Dokumen	12 Dokumen	100			
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp1,743,912,360	Rp1,735,058,590	99.49
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp84,461,928	Rp84,152,700	99.63
			12 Laporan	12 Laporan	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp84,461,928	Rp79,911,750	94.61
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp85,620,928	Rp85,385,600	99.73
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)					Rp122,218,713	Rp122,115,765	99.92
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)					Rp84,461,928	Rp84,177,550	99.66
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp84,461,928	Rp82,330,550	97.48
			12 Laporan	12 Laporan	100			
f	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Rp46,529,200	Rp44,613,019	95.88
			1 dokumen					
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp423,648,570	Rp388,040,923	91.60
a	Pengadaan Mebel					Rp150,000,000	Rp148,659,500	99.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			1 Paket	1 Paket	100			
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp273,648,570	Rp239,381,423	87.48
			1 Set	1 Set	100			
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp6,979,155,539	Rp6,787,285,774	97.25
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp11,758,000	Rp11,748,500	99.92
			1 Laporan	1 Laporan	100			
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1,962,895,215	Rp1,852,397,656	94.37
			1 Laporan	1 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp9,105,000	Rp6,685,138	73.42
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp23,805,000	Rp16,297,608	68.46
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp14,547,000	Rp12,187,945	83.78
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)					Rp6,600,000	Rp5,732,056	86.85
			12 Laporan	12 Laporan	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)					Rp19,400,000	Rp17,644,908	90.95
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp12,963,024	Rp12,591,587	97.13
			12 Laporan	12 Laporan	100			
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp4,104,025,774	Rp4,037,943,850	98.39
			78 Orang	78 Orang	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp141,575,048	Rp141,575,048	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp141,575,048	Rp141,575,048	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp141,575,048	Rp141,575,048	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)					Rp106,181,286	Rp106,181,286	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
	Wilayah IV)							
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)					Rp141,575,048	Rp141,575,048	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp141,575,048	Rp141,575,048	100.00
			12 Laporan	12 Laporan	100			
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp5,829,092,393	Rp5,721,623,770	98.16
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp879,789,086	Rp862,770,675	98.07
			20 Unit	20 Unit	100			
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp939,970,000	Rp926,822,040	98.60
			20 Unit	20 Unit	100			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Workshop dan Peralatan)					Rp869,449,800	Rp867,626,900	99.79
			25 Unit	25 Unit	100			
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp3,139,883,507	Rp3,064,404,155	97.60
			2 Unit	2 Unit	100			
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Rp979,393,380	Rp488,456,042	49.87

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota					Rp979,393,380	Rp488,456,042	49.87
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					Rp885,001,600	Rp421,663,137	47.65
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
b	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota					Rp94,391,780	Rp66,792,905	70.76
			9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100			
c	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota					Rp0		0.00
			0,4 Ha	-	-			
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					Rp584,232,907	Rp577,305,598	98.81
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					Rp584,232,907	Rp577,305,598	98.81
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi					Rp436,796,907	Rp434,483,457	99.47
			3 Dokumen	3 Dokumen	100			
b	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi					Rp147,436,000	Rp142,822,141	96.87
			50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	100			
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Rp500,185,990	Rp383,075,080	76.59

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					Rp500,185,990	Rp383,075,080	76.59
a	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat					Rp500,185,990	Rp383,075,080	76.59
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					Rp530,305,500	Rp515,183,560	97.15
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi					Rp530,305,500	Rp515,183,560	97.15
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					Rp0		0.00
			1 Dokumen	-	-			
b	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya					Rp530,305,500	Rp515,183,560	97.15
			9 Unit	9 Unit	100			
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					Rp79,752,862,195	Rp64,504,362,801	80.88
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					Rp79,752,862,195	Rp64,504,362,801	80.88
a	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					Rp69,155,012,092	Rp54,023,988,400	78.12

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			9 Dokumen	9 Dokumen	100			
b	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					Rp10,197,215,923	Rp10,107,207,593	99.12
			3 Unit	3 Unit	100			
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi					Rp179,049,500	Rp154,798,320	86.46
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
c.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)					Rp149,533,180	Rp146,470,991	97.95
			50 Bangunan	117 Bangunan	234			
			50 Dokumen	117 Dokumen	234			
d	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara					Rp72,051,500	Rp71,897,497	99.79
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					Rp879,443,253	Rp817,135,109	92.92
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Rp879,443,253	Rp817,135,109	92.92

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Rp336,795,500	Rp315,137,720	93.57
			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
b	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota (UPTD Pengawasan dan Pengendalian bangunan dan Gedung)					Rp321,092,520	Rp287,992,352	89.69
			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
			100 Orang	100 Orang	100			
c	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					Rp221,555,233	Rp214,005,037	96.59
			13 Dokumen	13 Dokumen	100			
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Rp199,525,277,485	Rp197,735,151,236	99.10
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					Rp199,525,277,485	Rp197,735,151,236	99.10
a	Penyusunan rencana, kebijakan, strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis perencanaan jalan dan jembatan					Rp5,738,381,087	Rp5,715,594,528	99.60
			9 Dokumen	9 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			2	2	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			Dokumen	Dokumen				
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan					Rp3,550,417,894	Rp3,468,354,626	97.69
			0,35 Ha	0,35 Ha	100			
			0,25 Ha	0,25 Ha	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
c	Pengelolaan Leger Jalan					Rp974,715,000	Rp954,464,632	97.92
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					Rp549,461,500	Rp546,002,148	99.37
			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
e	Pembangunan Jalan					Rp42,852,938,982	Rp42,671,549,937	99.58
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			2.305 Km	2.305 Km	100			
			3 Km	3 Km	100			
			1.6 Km	1.6 Km	100			
			0.35 Km	0.35 Km	100			
f	Pelebaran Jalan Menuju Standar					Rp22,309,892,625	Rp22,263,255,704	99.79
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			men	men				
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			20 Km	20 Km	100			
			0.7 Km	0.7 Km	100			
			0.7 Km	0.7 Km	100			
			0.4 Km	0.4 Km	100			
			0.5 Km	0.5 Km	100			
g	Pelebaran Jalan Menambah Lajur					Rp4,446,847,112	Rp4,364,332,653	98.14
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			0.14 Km	0.14 Km	100			
			0.733 Km	0.733 Km	100			
h	Rekonstruksi Jalan					Rp30,788,432,352	Rp30,671,561,581	99.62
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			men	men				
			0.1 Km	0.1 Km	100			
			30.6 Km	30.6 Km	100			
			0.064 Km	0.064 Km	100			
			1 Km	1 Km	100			
			0.826 Km	0.826 Km	100			
			0.222 Km	0.222 Km	100			
			38 Km	38 Km	100			
			1 Km	1 Km	100			
i	Rehabilitasi Jalan					Rp28,118,438,180	Rp27,748,310,045	98.68
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
			0.9 Km	0.9 Km	100			
			30 Km	30 Km	100			
			16.95 Km	16.95 Km	100			
			200 m	200 m	100			
j	Pemeliharaan Berkala Jalan							
	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp400,000,000	Rp397,734,994	99.43

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			91,34 m	91,34 m	100			
	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp904,130,939	Rp902,223,500	99.79
			0,385 Km	0,385 Km	100			
	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp968,104,209	Rp968,092,077	100.00
			15 Km	15 Km	100			
	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp501,000,000	Rp483,022,000	96.41
			15 Km	15 Km	100			
k	Pemeliharaan Rutin Jalan							
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp7,021,056,424	Rp7,000,051,796	99.70
			260,1 Km	260,1 m	100			
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp5,956,771,113	Rp5,935,529,284	99.64
			263,75 Km	263,75 Km	100			
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp4,507,605,815	Rp4,506,171,463	99.97
			198,83 Km	198.83	100			
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)					Rp5,834,118,960	Rp5,825,052,784	99.84
			170,7 Km	170,7 Km	100			
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)					Rp4,883,885,827	Rp4,883,227,478	99.99
			177,88 Km	177,88 m	100			
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)					Rp5,696,000,000	Rp5,689,229,617	99.88

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			211 Km	211 Km	100			
l	Pembangunan Jembatan					Rp7,838,140,393	Rp7,143,258,550	91.13
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			90 Meter	90 Meter	100			
m	Penggantian Jembatan					Rp10,697,859,223	Rp10,654,859,549	99.60
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			1 Doku men	1 Doku men	100			
			25.359 87469 74512 Meter	30 Meter	100			
			8.2945 58215 27302 Meter	6 Meter	100			
			157.95 45867 77582 m	75 m	100			
n	Pemeliharaan Rutin Jembatan							
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)					Rp320,600,000	Rp320,382,200	99.93
			1603 m	1603 m	100			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)					Rp247,291,972	Rp246,514,610	99.69
			1236,4 8 m	582,50 m	47.1			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)					Rp61,397,000	Rp61,381,400	99.97
			859,7 m	535.62	100			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)				100	Rp286,581,041	Rp286,176,637	99.86
			804 m	804 m	100			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)				100	Rp83,599,697	Rp82,626,000	98.84

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)	
			860,5 m	860,5 m	100				
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)				100	Rp164,500,000	Rp164,338,900	99.90	
			822,5 m	822,5 m	100				
o	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat				100	Rp78,627,250	Rp78,113,889	99.35	
			1 Dokumen	1 Dokumen	100				
	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat (UPTD Workshop dan Peralatan)					Rp1,191,847,900	Rp1,169,249,217	98.10	
			1100 Meter	1100 Meter	100				
			7 Lokasi	7 Lokasi	100				
p	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan					Rp594,366,640	Rp589,814,808	99.23	
			12 Dokumen	12 Dokumen	100				
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD Workshop dan Peralatan)					Rp673,254,950	Rp662,277,693	98.37	
			12 Dokumen	12 Dokumen	100				
q	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan					Rp82,662,400	Rp82,216,219	99.46	
			6 Dokumen	6 Dokumen	100				
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD laboratorium Bahan Konstruksi)					Rp1,202,351,000	Rp1,200,180,717	99.82	
			9 Unit	11 Unit	100				
			13 Laporan	13 Laporan	100				
			20 Unit	20 Unit	100				
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						Rp1,408,250,750	Rp1,069,499,741	75.95

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PP 21 Tahun 2021 tentang Penyele nggaran Penataa n Ruang				Rp371,758,000	Rp354,861,741	95.46
a	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi					Rp274,000,000	Rp267,471,331	97.62
			1 Peraturan Daerah	1 Ranpe rda	100			
b	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					Rp97,758,000	Rp87,390,410	89.39
			60 Orang	60 Orang	100			
			60 Orang	60 Orang	100			
			60 Orang	60 Orang	100			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					Rp212,983,300	Rp190,918,815	89.64
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi					Rp143,135,300	Rp126,980,261	88.71
		1 Laporan	1 Laporan	100				
b	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota					Rp69,848,000	Rp63,938,554	91.54
		1 Ranpe rda	1 Ranpe rkada	100				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					Rp274,162,000	Rp166,492,441	60.73
a	Sistem Informasi Penataan Ruang					Rp274,162,000	Rp166,492,441	60.73
		1 Laporan	1 Lapop ran	100				
		1 Laporan	1 Laporan	100				
		70 Orang	70 Orang	100				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENT ASE REALISASI (%)
			1 SK Gubernur	1 SK Gubernur	100			
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					Rp549,347,450	Rp357,226,744	65.03
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang					Rp174,112,700	Rp64,044,995	36.78
			1 Laporan	1 Laporan	100			
			1 Naskah	-	-			
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang					Rp179,157,750	Rp150,420,550	83.96
			1 Laporan	1 Laporan	100			
			1 Laporan	1 Laporan	100			
c	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					Rp64,615,800	Rp43,225,711	66.90
			1 Laporan	1 Laporan	100			
d	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Rp131,461,200	Rp99,535,488	75.71
			1 Laporan	1 Laporan	100			

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			
BIDANG CIPTA KARYA			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota			
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pada Kegiatan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	perubahan lingkup dokumen dari sebelumnya AMDAL	UKL/UPL dari hasil penapisan oleh dinas Lingkungan Hidup
2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		
	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat dan PAMSIMAS (SPM Air Minum)	Sisa anggaran adalah AP berupa perjalanan dinas untuk pembinaan dan monitoring kepada kabupaten/kota yang dijadwalkan dari bulan Oktober-Desember pada anggaran perubahan TA 2023	Pengesahan DPA perubahan baru tanggal 20 November 2023 sehingga tidak dapat diserap maksimum karena terbatasnya waktu pelaksanaan
	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat		
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		
	Konsultansi Penilaian Harga Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi	dokumen persiapan pembebasan tanah belum selesai	Melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi	dokumen persiapan pembebasan tanah belum selesai	Melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait

	Pengukuran Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi	dokumen persiapan pembebasan tanah belum selesai	Melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
1	Sub Kegiatan : Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
	Pendampingan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota	Sisa anggaran adalah AP berupa perjalanan dinas untuk pembinaan dan monitoring kepada kabupaten/kota yang dijadwalkan dari bulan Oktober-Desember pada anggaran perubahan TA 2023	Pengesahan DPA perubahan baru tanggal 20 November 2023 sehingga tidak dapat diserap maksimum karena terbatasnya waktu pelaksanaan	
	Pendampingan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II			
	Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumbar			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
1	Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia (Lanjutan)	1. Akses lokasi yang sulit sehingga terdapat kendala pada mobilisasi alat dan material 2. Ketidacermatan dalam pengaturan cashflow	Terkait pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia akan dilanjutkan pada tahun 2024. Adapun anggaran untuk pembangunan	

		financial penyedia	lanjutan ini telah disediakan pada tahun anggaran 2024.	
	Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan datangnya mesin/peralatan impor dari Cina 2. Tenaga kerja yang tidak optimal 3. Kondisi cuaca yang sering hujan yang mengakibatkan material alam terlambat supply 4. Ketidacermatan dalam pengaturan cashflow financial penyedia 5. Supplier beton ready mix yang terbatas di Kabupaten Pasaman Barat 6. Permasalahan non teknis lainnya seperti sosial masyarakat 	<p>Untuk penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan telah diberikan kesempatan kepada penyedia berupa tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut. Kemudian juga, ada rencana untuk pengadaan mesin lainnya agar pakan dapat diolah menjadi pelet, karena harapannya dengan adanya mesin tersebut produktifitas dari fasilitas pengolahan pakan ini bisa lebih dioptimalkan.</p>	

			Oleh sebab itu, pada tahun 2024 direncanakan akan dilakukan pengajuan tambahan anggaran untuk pengadaan mesin tersebut.	
BIDANG BINA MARGA				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
1	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan			
	Pembangunan Jembatan RS. Unand	Kegiatan tidak dapat diselesaikan di Tahun Anggaran 2023	Memberikan Kesempatan kepada Rekanan/Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran dan diperkirakan selesai di bulan Januari 2024	
	Pengawasan Pembangunan Jembatan RS. Unand			
BIDANG TATA RUANG				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				
1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Efisiensi penggunaan anggaran pada akomodasi narasumber dan uang harian peserta Sosialisasi	Mengoptimalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku	
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi			

	Paket Pekerjaan :	Anggaran yang semula direncanakan untuk melaksanakan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN pasca dikeluarkannya berita acara kesepakatan substansi oleh DPRD akan tetapi sampai akhir anggaran belum ada kesepakatan	Optimalisasi penggunaan anggaran	
	a. Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisis RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak			
	b. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi			
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				
3	Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang			
	Paket Pekerjaan :	Adanya paket pekerjaan pengadaan langsung yang gagal	Mempercepat proses pengadaan ke triwulan II	
	a. Tenaga IT Geoportal Provinsi Sumatera Barat			
	b. Tenaga IT SIMTARU Provinsi Sumatera Barat			
	c. Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat			
	Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang			
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			
	Paket Pekerjaan :	Kurang terealisasi akomodasi narasumber (Narasumber melakukan sosialisasi	Melakukan koordinasi lebih awal secara intensif dengan narasumber terkait jadwal pelaksanaan	
	a. Penyusunan Dokumen Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi			

	Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	secara daring sehingga akomodasi tidak dibayarkan)	acara	
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
	Paket Pekerjaan :	Efisiensi penggunaan anggaran	Lebih cermat dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	
	a. Penyusunan Dokumen Audit Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
6	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang			
	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang	Pelaksanaan Klinik PPNS Penataan Ruang pada tahun 2023 terlaksana 1 kali, akan tetapi narasumber dari pusat pada acara tersebut hanya 1 orang sehingga ada sisa anggaran pada honorarium narasumber atau pembahas, moderator dan rohaniwan serta akomodasi narasumber dan hanya	Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN secara intensif agar telaksananya Klinik PPNS dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelanggaran pemanfaatan ruang	
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			

		terlaksana beberapa kali rapat karena tidak adanya permintaan pembahasan kasus oleh PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.		
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	hanya terlaksana beberapa kali rapat rutin/rapat khusus FPR karena tidak adanya permintaan pembahasan dokumen Rencana Tata Ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bidang Tata Ruang Dinas BMCKTR untuk tahun 2023 (penyusunan RTRW Kabupaten/Kota belum sampai tahap pembahasan dengan Tim FPR Sumatera Barat)	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intensif terkait permasalahan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
	Belanja Barang			
	Belanja Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG (P2BG)			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			

KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI				
1	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi			
	Swakelola Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	a. Terbatasnya tenaga teknik yang bersertifikasi, sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan b. Minimnya fasilitas peningkatan kemampuan staf	a. Mengusulkan penambahan staf tenaga teknik kepada Sekretariat Dinas BMCKTR Prov Sumbar. b. Mengusulkan kepada Sekretariat Dinas BMCKTR untuk proaktif dalam pembinaan staf teknik maupun dibidang administrasi perkantoran	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS AERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota			
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung	Banyaknya permintaan tenaga pengelola teknis, sedangkan tenaga yang tersedia masih belum mencukupi	Diperlukan pelaksanaan pelatihan PTBGN	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung			
	Dana Penunjang Kegiatan/Administrasi Proyek			
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

	Belanja Barah Habis Pakai	Kesulitan mendapatkan suku cadang alat berat tepat waktu	Mendorong supplier suku cadang alat berat untuk lebih mempercepat mendatangkan suku cadang alat berat, serta mendorong supaya suku cadang tersebut tersedia setiap saat	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri			
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
1	Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			
	Belanja Barah Habis Pakai	Pekerjaan Bencana/Tanggap Darurat tergantung bencana yang terjadi	Mengoptimalkan dan sebisa mungkin tanggap dalam penanganan bencana yang terjadi	
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian air, listrik dan internet yang lebih rendah dari perkiraan awal.	Penganggaran yang disesuaikan dengan perkiraan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Belanja Tagihan Listrik			
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian	Perkiraan	

	Belanja Tagihan Listrik	Listrik dibawah rata - rata bulan sebelumnya, Pemakaian internet tidak sesuai dengan paket yg di disediakan DPA (menggunakan TV internet)	Kebutuhan Pemakaian Listrik, PDAM, Internet	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian air, listrik dan internet yang lebih rendah dari perkiraan awal.	Penganggaran yang disesuaikan dengan perkiraan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Belanja Tagihan Listrik			
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian air, listrik dan internet yang lebih rendah dari perkiraan awal.	Penganggaran yang disesuaikan dengan perkiraan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Belanja Tagihan Listrik			
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian	Penganggaran	

	Belanja Tagihan Listrik	air, listrik dan internet yang lebih rendah dari perkiraan awal.	yang disesuaikan dengan perkiraan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II. 1	Kelebihan banyak anggaran pada sub pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan	Memindahkan anggaran pemeliharaan rutin jembatan ke anggaran pemeliharaan rutin jalan dan Menghitung/Estimasi ulang dalam perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan yang sudah dikerjakan di tahun sebelumnya	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II. 1			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Belanja Tagihan Air	Pemakaian air, listrik dan internet yang lebih rendah dari perkiraan awal.	Penganggaran yang disesuaikan dengan perkiraan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Belanja Tagihan Listrik			
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022;

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2023 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

**Kebijakan Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
(BMCKTR) Tahun 2023**

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan merupakan pembangunan proyek infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dinonaktifkan dengan cara memastikan ekonomi dan keuangan, sosial, lingkungan dan kelembagaan mempunyai keberlanjutan selama siklus proyek.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Gubernur melalui TAPD perlu meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi baik melalui APBD dan mengupayakan semaksimal mungkin dana desentralisasi.	Dinas BMCKTR selalu berkoordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan baik kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan, termasuk penyediaan data kebutuhan anggaran dan kondisi kemantapan jalan berdasarkan hasil survey terakhir Untuk menggaet dana dari pusat, Dinas BMCKTR melalui bidang bina marga telah menyiapkan dokumen readiness criteria meliputi	Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar melalui Bidang Bina Marga telah berusaha untuk memaksimalkan peluang pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi dengan menggunakan dana APBN, seperti: a. DAK, untuk pelaksanaan 4 paket pekerjaan b. DAU, untuk pelaksanaan 11 paket pekerjaan c. Inpres, untuk pelaksanaan 1 paket pekerjaan yaitu paket

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>DED, RAB, Dokling, FS dan lahan; untuk ruas jalan usulan dan ditargetkan usulan dapat diterima. Dinas juga melaksanakan koordinasi dengan balai jalan nasional wilayah Sumbar sebagai perpanjangan kementerian PUPR di daerah. Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 ada pembiayaan pembangunan jalan Provinsi melalui dana APBN dengan nilai alokasi dana Rp233.992.660.000,00 yang dilaksanakan dengan kontrak secara multiyear untuk Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang. Pada tahun 2023 ini juga diusulkan beberapa ruas jalan provinsi dengan inpres.</p>	<p>Rekonstruksi Jalan di ruas Batas Payakumbuh-Sitangkai (P.044). Adapun untuk tahun 2024, telah direncanakan dan diusulkan 14 ruas jalan provinsi untuk dapat diakomodir dengan menggunakan dana Inpres dan diusulkan 9 ruas jalan provinsi untuk ditangani dengan menggunakan DAK.</p>
2	<p>Menerapkan system pengadaan e-katalog bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan peluang yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dinas BMCKTR Provinsi sejak tahun 2021 telah melakukan kajian tentang pemakaian e-katalog pemeliharaan jalan provinsi dan pada tahun 2022 bekerjasama dengan biro PBJ dan LKPP telah meng-inisiasi hadirnya e-katalog pemeliharaan jalan provinsi tersebut. Di tahun 2023 ini dinas BMCKTR telah mulai melaksanakan pengadaan e-katalog terhadap beberapa item pekerjaan aspal untuk pemeliharaan jalan melalui UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I s/d VI, dan rencana beberapa pekerjaan overlay pada APBD Perubahan 2023. Sesuai himbuan Presiden dan juga terkait beberapa pembahasan untuk mendorong e-katalog lokal ke-PU-an Bersama Biro PBJ dan OPD Teknis ke-PU-an lainnya, sedang mempersiapkan e-</p>	<p>Pada tahun 2023 Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah selesai mempersiapkan sistem e-katalog untuk mengakomodir pengadaan barang/jasa yang menunjang program/kegiatan yang diampu masing-masing bidang, dimana:</p> <p>a. Bidang Bina Marga pada tahun 2023 sudah mulai menerapkan penggunaan e-katalog untuk paket-paket pekerjaan pada anggaran perubahan tahun 2023 dengan menggunakan e-katalog sektoral kementerian PUPR. Pada awal tahun 2024 telah disusun etalase e-katalog lokal pemprov sumbar untuk penyelenggaraan Jalan Provinsi, Dan direncanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkup kegiatan bina marga akan menggunakan e-katalog lokal</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		katalog lokal tersebut dan melakukan koordinasi dengan LKPP serta study tiru ke provinsi yang sudah menerapkan e-katalog lokal ke-PU-an tersebut secara optimal. Diharapkan pada tahun 2024 dinas BMCKTR sudah dapat secara optimal memakai e-katalog dalam proses pengadaan.	prov. sumatera barat. b. Bidang Cipta Karya akan menerapkan penggunaan sistem e-katalog pada pengadaan untuk paket-paket pekerjaan di tahun anggaran 2024 (setelah dikeluarkannya pengumuman pencantuman barang/jasa pada e-katalog untuk program/kegiatan yang diampu bidang Cipta Karya).
3	Untuk penyelesaian pembangunan bangunan strategis, agar pemerintah daerah mengupayakan melalui sumber pendanaan diluar APBD. Pembiayaan untuk lanjutan pembangunan seperti Main Stadion dan gedung budaya yang masih memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti dari pihak ketiga melalui pola kerjasama pembangunan infrastruktur, dalam bentuk KSP, KSI KPBU maupun bentuk Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan.	Pemprov lebih berusaha menggaet dana pusat atau dana diluar APBD untuk pembangunan bangunan dengan biaya besar (pembangunan stadion utama dan gedung budaya) dan mencoba me follow up kembali proposal yg pernah disampaikan ke kemenpora dan pihak-pihak swasta.	Dinas BMCKTR Prov. Sumbar dari tahun 2022 terus berusaha untuk mencari solusi terkait kelanjutan pembangunan stadion utama dan gedung kebudayaan, namun sampai saat ini proposal yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan pihak-pihak swasta masih belum ada yang diterima. Selanjutnya Dinas BMCKTR akan terus melakukan koordinasi dengan OPD horizontal di lingkup Pemprov Sumbar (Dispora, Disbud, Bappeda, TAPD) terkait solusi untuk kelanjutan dari pembangunan Stadium Utama dan Gedung Kebudayaan.
4	Menyediakan anggaran untuk percepatan pembangunan TPA dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah di Sumatera	1. Melakukan penyusunan Studi Kelayakan (FS) TPA Regional Padang Pariaman dengan pagu anggaran Rp. 486.164.000, yang bertujuan untuk menyusun kajian kelayakan dari Aspek Teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan. 2. Mengaktivasi Pokja PKP Prov. Sumatera Barat yang juga terdiri dari Bappeda, DLH, Dinkes, DinPerkimtan, BPPW sumbar dengan maksud untuk memfasilitasi, menjamin mutu Dokumen Strategi Sanitasi	Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah selesai melakukan penyusunan FS TPA Regional Padang Pariaman. Adapun setelah penyusunan FS dan Pembuatan MoU, kegiatan/tahapan berikutnya adalah pembuatan DED TPA Regional Padang Pariaman. Namun untuk saat ini, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2024 karena adanya pengurangan anggaran pada kegiatan yang

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Kab/Kota (SSK) sebagai guideline 5 tahun kedepan yang bertujuan untuk menuntaskan permasalahan Persampahan dan Air limbah di kab/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran Rp. 261.535.000,-	dimaksud dan juga kurangnya dukungan dari lembaga legislatif untuk pekerjaan dengan skala regional.
5	Mempercepat proses revisi Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam rangka mempersiapkan pola dan struktur ruang untuk pembangunan daerah dan mendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat.	Saat ini proses proses penyusunan Ranperda revisi RTRWP sudah selesai dan masuk dalam tahap pembahasan di DPRD utk mendapatkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Substansi antara DPRD dengan Gubernur. Dinas BMCKTR menunggu Biro Hukum menyampaikan Ranperda RTRWP ke DPRD. Setelah diperoleh BA kesepakatan Substansi tsb maka diajukan ke Kementerian ATR/BPN utk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN.	Proses RTRW sudah melalui beberapa tahapan, dan saat ini dalam proses penyepakatan Substansi oleh DPRD untuk kemudian disampaikan kepada Menteri ATR/BPN. Untuk bisa penetapan Ranperda menjadi Perda diperlukan beberapa proses yang harus dilalui: <ul style="list-style-type: none"> - Legislatif perlu melakukan studi banding/studi tiru ke Provinsi lain yang sudah menetapkan Perda RTRW. - Setelah pembahasan dan mendapatkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur, maka Gubernur menyampaikan Ranperkada tersebut kepada Menteri ATR/BPN untuk memperoleh Persetujuan Substansi melalui pembahasan lintas sektor. - Jika dalam pembahasan tersebut terdapat perbaikan maka Tim Teknis dengan didampingi Tim Supervisi dari ATR/BPN akan melakukan pendampingan. - Setelah persetujuan Substansi diterbitkan maka sesegeranya paling lambat 2 (dua bulan) setelahnya sudah harus diPerdakan.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;

2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2022 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Gubernur melalui TAPD perlu meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi baik melalui APBD dan mengupayakan semaksimal mungkin dana desentralisasi.	Dinas BMCKTR selalu berkoordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan baik kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan, termasuk penyediaan data kebutuhan anggaran dan kondisi kemantapan jalan berdasarkan hasil survey terakhir Untuk menggaet dana dari pusat, Dinas BMCKTR melalui bidang bina marga telah menyiapkan dokumen readiness criteria meliputi DED, RAB, Dokling, FS dan lahan; untuk ruas jalan usulan dan ditargetkan usulan dapat diterima. Dinas juga melaksanakan koordinasi dengan balai jalan nasional wilayah Sumbar sebagai perpanjangan kementerian PUPR di daerah. Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 ada pembiayaan pembangunan jalan Provinsi melalui dana APBN dengan	Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar melalui Bidang Bina Marga telah berusaha untuk memaksimalkan peluang pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi dengan menggunakan dana APBN, seperti: a. DAK, untuk pelaksanaan 4 paket pekerjaan b. DAU, untuk pelaksanaan 11 paket pekerjaan c. Inpres, untuk pelaksanaan 1 paket pekerjaan yaitu paket Rekonstruksi Jalan di ruas Batas Payakumbuh-Sitangkai (P.044). Adapun untuk tahun 2024, telah direncanakan dan diusulkan 14 ruas jalan provinsi untuk dapat diakomodir dengan menggunakan dana Inpres dan diusulkan 9 ruas jalan provinsi untuk ditangani dengan menggunakan DAK.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		nilai alokasi dana Rp233.992.660.000,00 yang dilaksanakan dengan kontrak secara multiyear untuk Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang. Pada tahun 2023 ini juga diusulkan beberapa ruas jalan provinsi dengan inpres.	
2	Menerapkan system pengadaan e-katalog bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan peluang yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan	Dinas BMCKTR Provinsi sejak tahun 2021 telah melakukan kajian tentang pemakaian e-katalog pemeliharaan jalan provinsi dan pada tahun 2022 bekerjasama dengan biro PBJ dan LKPP telah meng-inisiasi hadirnya e-katalog pemeliharaan jalan provinsi tersebut. Di tahun 2023 ini dinas BMCKTR telah mulai melaksanakan pengadaan e-katalog terhadap beberapa item pekerjaan aspal untuk pemeliharaan jalan melalui UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I s/d VI, dan rencana beberapa pekerjaan overlay pada APBD Perubahan 2023. Sesuai himbuan Presiden dan juga terkait beberapa pembahasan untuk mendorong e-katalog lokal ke-PU-an Bersama Biro PBJ dan OPD Teknis ke-PU-an lainnya, sedang mempersiapkan e-katalog lokal tersebut dan melakukan koordinasi dengan LKPP serta study tiru ke provinsi yang sudah menerapkan e-katalog lokal ke-PU-an tersebut secara optimal. Diharapkan pada tahun 2024 dinas BMCKTR sudah dapat secara optimal memakai e-katalog dalam proses pengadaan.	Pada tahun 2023 Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah selesai mempersiapkan sistem e-katalog untuk mengakomodir pengadaan barang/jasa yang menunjang program/kegiatan yang diampu masing-masing bidang, dimana: a. Bidang Bina Marga pada tahun 2023 sudah mulai menerapkan penggunaan e-katalog untuk paket-paket pekerjaan pada anggaran perubahan tahun 2023 dengan menggunakan e-katalog sektoral kementerian PUPR. Pada awal tahun 2024 telah disusun etalase e-katalog lokal pemprov sumbar untuk penyelenggaran Jalan Provinsi, Dan direncanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkup kegiatan bina marga akan menggunakan e-katalog lokal prov. sumatera barat. b. Bidang Cipta Karya akan menerapkan penggunaan sistem e-katalog pada pengadaan untuk paket-paket pekerjaan di tahun anggaran 2024 (setelah dikeluarkannya pengumuman pencantuman barang/jasa pada e-katalog untuk program/kegiatan yang diampu bidang Cipta Karya).

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	Untuk penyelesaian pembangunan bangunan strategis, agar pemerintah daerah mengupayakan melalui sumber pendanaan diluar APBD. Pembiayaan untuk lanjutan pembangunan seperti Main Stadion dan gedung budaya yang masih memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti dari pihak ketiga melalui pola kerjasama pembangunan infrastruktur, dalam bentuk KSP, KSI KPBU maupun bentuk Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan.	Pemprov lebih berusaha menggaet dana pusat atau dana diluar APBD untuk pembangunan bangunan dengan biaya besar (pembangunan stadion utama dan gedung budaya) dan mencoba me follow up kembali proposal yg pernah disampaikan ke kemenpora dan pihak-pihak swasta.	Dinas BMCKTR Prov. Sumbar dari tahun 2022 terus berusaha untuk mencari solusi terkait kelanjutan pembangunan stadion utama dan gedung kebudayaan, namun sampai saat ini proposal yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan pihak-pihak swasta masih belum ada yang diterima.Selanjutnya Dinas BMCKTR akan terus melakukan koordinasi dengan OPD horizontal di lingkup Pemprov Sumbar (Dispora, Disbud, Bappeda, TAPD) terkait solusi untuk kelanjutan dari pembangunan Stadium Utama dan Gedung Kebudayaan.
4	Menyediakan anggaran untuk percepatan pembangunan TPA dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah di Sumatera	1. Melakukan penyusunan Studi Kelayakan (FS) TPA Regional Padang Pariaman dengan pagu anggaran Rp. 486.164.000, yang bertujuan untuk menyusun kajian kelayakan dari Aspek Teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan. 2. Mengaktivasi Pokja PKP Prov. Sumatera Barat yang juga terdiri dari Bappeda, DLH, Dinkes, DinPerkimtan, BPPW sumbar dengan maksud untuk memfasilitasi, menjamin mutu Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) sebagai guideline 5 tahun kedepan yang bertujuan untuk menuntaskan permasalahan Persampahan dan Air limbah di kab/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran Rp. 261.535.000,-	Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah selesai melakukan penyusunan FS TPA Regional Padang Pariaman. Adapun setelah penyusunan FS dan Pembuatan MoU, kegiatan/tahapan berikutnya adalah pembuatan DED TPA Regional Padang Pariaman. Namun untuk saat ini, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2024 karena adanya pengurangan anggaran pada kegiatan yang dimaksud dan juga kurangnya dukungan dari lembaga legislatif untuk pekerjaan dengan skala regional.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
5	Mempercepat proses revisi Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam rangka mempersiapkan pola dan struktur ruang untuk pembangunan daerah dan mendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat.	Saat ini proses proses penyusunan Ranperda revisi RTRWP sudah selesai dan masuk dalam tahap pembahasan di DPRD utk mendapatkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Substansi antara DPRD dengan Gubernur. Dinas BMCKTR menunggu Biro Hukum menyampaikan Ranperda RTRWP ke DPRD. Setelah diperoleh BA kesepakatan Substansi tsb maka diajukan ke Kementerian ATR/BPN utk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN.	Proses RTRW sudah melalui beberapa tahapan, dan saat ini dalam proses penyepakatan Substansi oleh DPRD untuk kemudian disampaikan kepada Menteri ATR/BPN. Untuk bisa penetapan Ranperda menjadi Perda diperlukan beberapa proses yang harus dilalui: <ul style="list-style-type: none"> - Legislatif perlu melakukan studi banding/studi tiru ke Provinsi lain yang sudah menetapkan Perda RTRW. - Setelah pembahasan dan mendapatkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur, maka Gubernur menyampaikan Ranperkada tersebut kepada Menteri ATR/BPN untuk memperoleh Persetujuan Substansi melalui pembahasan lintas sektor. - Jika dalam pembahasan tersebut terdapat perbaikan maka Tim Teknis dengan didampingi Tim Supervisi dari ATR/BPN akan melakukan pendampingan. - Setelah persetujuan Substansi diterbitkan maka sesegeranya paling lambat 2 (dua bulan) setelahnya sudah harus diPerdakan.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2022 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;

4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, Dalam hal urusan pekerjaan umum Fraksi PDI dan PKB melihat bahwa dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat masih banyak ketimpangan dan pemerataan karena kami melihat bahwa untuk pembangunan infrastruktur masih diwilayah tertentu saja sedangkan wilayah baru dan pusat perekonomian baru masih belum mendapatkan alokasi dan program yang cukup dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk itu Fraksi Kami meminta agar pemerintah daerah bisa meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. selain hal tersebut Fraksi kami melihat bahwa tentang perda kebencanaan, perda tentang bangunan gedung dan perda tentang pemanfaatan jalan masih</p>	<p>1. Perda tentang Kebencanaan Masih menggunakan Perda No. 5 Tahun 2007, untuk Perda terbaru masih dalam proses penyusunan. 2. Perda tentang Bangunan Gedung Perlu revisi Perda no. 6 tahun 2011 tentang bangunan gedung mengingat sudah tidak relevan lagi dengan peraturan bangunan gedung terbaru. Banyaknya pendirian bangunan di Kawasan bencana bukan kewenangan Dinas BMCKTR karena pemberian izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Perda Pemanfaatan Jalan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Untuk izin baru untuk penempatan utilitas di ruang milik jalan telah melalui rekomendasi dari dinas BMCKTR antara lain pipa PDAM, tiang PLN, tiang telekomunikasi dan infrastruktur utilitas lainnya, serta sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Dan jika ada aktivitas di rumija tanpa izin akan di stop oleh petugas dinas via UPTD wilayah dan diinstruksikan untuk mengurus perizinan untuk melanjutkan kegiatan.</p>	<p>Terkait Perda Kebencanaan saat ini masih menggunakan Perda No. 5 Tahun 2017 dan untuk Penataan Bangunan dan Gedung saat ini prosedur pemberian izin mendirikan bangunan masih merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk pemanfaatan jalan, pada tahun 2023 telah diterbitkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dimana di dalam Perda tersebut telah dijelaskan peruntukan dan penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija) Adapun dengan disahkannya Perda tersebut, peran Dinas BMCKTR ialah sebagai OPD yang memberikan rekomendasi teknis yang mendetailkan prosedur dan melaksanakan pengawasan terkait penempatan dan pemasangan utilitas di Rumija. Kemudian juga untuk tahun 2023, melalui sub kegiatan Leger Jalan, Dinas BMCKTR juga telah berusaha untuk melakukan pemasangan patok rumija di ruas-ruas jalan provinsi, harapannya dengan adanya patok-patok</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	belum terlaksana penerapan hal ini dapat dilihat dari pendirian bangunan di wilayah Merah rawan bencana serta pemanfaatan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, untuk itu agar perda sesuai dengan yang kita inginkan maka pemerintah daerah harus selalu mengawal perda ini bisa dilaksanakan untuk kebaiakan kita bersama dan masyarakat sumatera barat baik dalam peningkatan SDM ataupun dalam hal Penganggaranya	Dari 65 ruas jalan telah terdapat 9 ruas jalan yang memiliki patok rumija dan diagendakan di tahun 2023 akan di pasang di 2 ruas jalan lagi. Dan direncanakan setiap tahun akan dilaksanakan sehingga seluruh jalan provinsi telah memiliki patok rumija. Dengan adanya patok rumija diharapkan tidak ada lagi bangunan di dalam rumija dan memudahkan penindakan dari aparat terkait.	tersebut tidak ada lagi bangunan yang berada di dalam Rumija.
2	Dari sisi Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, Fraksi Partai Gerindra melihat belum ada kemampuan dan keberhasilan Saudara Gubernur dalam menggaet dana Pusat atau dana diluar APBD untuk pembiayaan penyelesaian Stadium Utama Sumatera Barat barat dan Gedung Budaya.	- Kelanjutan Pembangunan untuk penyelesaian Main Stadium Sumatera Barat tidak menjadi kewenangan pusat, jadi pembiayaan harus dari APBD atau pihak ketiga. Untuk pihak ketiga, belum ada yang disetujui. - Untuk Gedung Kebudayaan, Dinas BMCKTR sedang melakukan Revisi pada FS dan pembangunan akan dilakukan dengan sumber pembiayaan apakah kerjasama dengan badan usaha atau pihak swasta yang dikerjasamakan. Pengelolaan Main Stadium saat ini masih berada di BMCKTR, dan belum diserahkan pengelolaannya ke Dispora Provinsi Sumatera Barat	Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah menyelesaikan revisi FS untuk Pembangunan Gedung Kebudayaan. Adapun untuk tahapan selanjutnya, Dinas BMCKTR berencana untuk mengadakan audiensi kepada Kepala Daerah untuk membahas rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilaksanakan berdasarkan FS yang telah direvisi tersebut.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	<p>Selain itu, kami melihat pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di sektor infrastruktur masih sangat lemah, sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya, kegiatan yang putus kontrak atau kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.</p>	<p>1. Untuk pengerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya, disebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan dalam proses pengadaan - Cuaca yang tidak menentu di lapangan <p>2. Penyebab terjadinya pekerjaan putus kontrak antara lain : penyedia jasa yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi tidak memiliki kompetensi dan kemampuan dalam penyelesaian pekerjaan.</p> <p>3. Untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kualitas serta kuantitas yang sangat kecil, upaya yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan tim teknis untuk melakukan monitoring dan melakukan Quality Control oleh UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.</p> <p>4. Selain itu, untuk mendapatkan penyedia jasa yang baik, Dinas BMCKTR Sumbar dalam PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) 2023 meminta 2 syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia jasa tidak boleh mendapatkan SCM (Show Cause Meeting) 3 dan denda keterlambatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. - Penyedia jasa sudah menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK <p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat proses pengadaan dengan metode tender dini. - Melaksanakan pekerjaan di musim kemarau dan menghindari pelaksanaan pekerjaan di musim hujan. - Memilih calon penyedia jasa 	<p>Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah mengajukan 2 persyaratan lebih lanjut untuk pemilihan penyedia jasa, yang mana 2 syarat tersebut ialah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia jasa tidak boleh mendapatkan SCM (Show Cause Meeting) 3 dan denda keterlambatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. - Penyedia jasa sudah menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK. <p>2 syarat tersebut telah disampaikan dalam bentuk Surat Kepala Dinas BMCKTR Prov. Sumbar yang kemudian diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan telah digunakan sebagai dasar penentuan/pemilihan penyedia jasa yang akan melaksanakan paket-paket pekerjaan yang ada di Dinas BMCKTR pada TA 2023. Untuk pelaksanaan tender dini, pada bidang Bina Marga di tahun 2023 telah melaksanakan tender dini dimana per bulan Maret 2023 hampir keseluruhan paket pekerjaan telah terkontak.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		yang memiliki kompetensi dan kemampuan antara lain dengan mensyaratkan didalam KAK : tidak pernah dikenakan denda keterlambatan dalam 2 tahun terakhir dan telah melunasi tunggakan temuan auditor jika ada	
4	<p>Bagi Fraksi Partai Gerindra, saudara Gubernur tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam pembangunan jalan dan irigasi. Buktinya, setiap tahun, anggaran untuk dinas terkait selalu mengalami penurunan. Masih banyak jalan yang belum mantap dan masih banyak irigasi pertanian yang tidak berfungsi optimal. Kami ingin memberi perhatian misalnya pada jalan Provinsi dari Tapus Muara Sei Lolo Gelugur di Kabupaten Pasaman yang masih sangat memprihatinkan. Begitu juga jalan Panti ke Simpang Empat disamping banyak berlobang, juga terdampak bencana alam.</p>	<p>Untuk penanganan jalan provinsi khususnya jalan yang belum tuntas terbangun seperti ruas jalan Tapus – muaro sei. Lolo – gelugur (P.101) maupun jalan rusak terdampak bencana gempa bumi ruas panti – simpang empat (P.031) membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Sedangkan anggaran yang tersedia harus dialokasikan juga ke jalan existing aspal untuk mempertahankan kemantapan jalan khususnya jalan poros distribusi barang dan pergerakan orang, serta jalan – jalan konektivitas antar kabupaten kota lainnya. Sehingga penanganan untuk kedua ruas tersebut tidak bisa di laksanakan secara maksimal. Khusus untuk ruas Tapus – Muaro Sei. Lolo – Gelugur telah ditangani dengan DAK dan APBD pada tahun 2022, telah di usulkan juga dengan inpres prioritas nomor 5 pada tahun 2023 namun masih belum mendapat alokasi anggaran dari kementerian PUPR. pada tahun 2024 diusulkan kembali melalui inpres dan saat ini proses evaluasi masih berjalan. Untuk ruas panti - simpang empat telah di tangani di tahun 2022 dengan APBD Provinsi dan dana DAK namun belum bisa menangani seluruh kerusakan jalan. Oleh karena itu, pada</p>	<p>Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar terus berkomitmen untuk menangani dan memelihara ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan kepada Dinas BMCKTR. Namun untuk penanganan ruas jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) dan Panti- Simp. Empat (P.031) belum bisa dilaksanakan secara optimal disebabkan penanganan ruas-ruas tersebut membutuhkan alokasi dana yang cukup besar, sedangkan pada tahun 2023 sudah diusulkan untuk masuk dalam dana Inpres dan DAK, namun belum bisa mendapatkan alokasi dana karena tidak berada dalam prioritas 1. Adapun untuk tahun 2024, sedang dalam proses pengusulan untuk masuk dalam alokasi dana Inpres. Sampai dengan awal tahun 2024 ini, BPJN sedang melakukan tinjauan ke lapangan ke setiap ruas yang diusulkan (termasuk 2 ruas tersebut) sebagai salah satu prosedur sebelum melakukan rivi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>tahun 2023 diusulkan penanganan melalui dana Inpres urutan prioritas nomor 3, namun tidak mendapat alokasi anggaran. kemudian pada tahun 2024 akan di tangani oleh dinas BMCKTR dengan menggunakan dana DBH Sawit, dan di harapkan jalan-jalan rusak di ruas tersebut dapat tertangani. Dinas BMCKTR tetap berkomitmen untuk penanganan jalan provinsi termasuk di ruas Tapus – Muaro Sei. Lolo – Gelugur (P.101) dan ruas jalan panti – simpang empat (P.031) sesuai dengan kemampuan anggaran dinas BMCKTR</p>	
5	<p>Kemantapan jalan yang tidak mencapai target di Sumatera Barat pada tahun 2022, hendaknya menjadi perhatian serius oleh Saudara Gubernur kedepannya dalam pengalokasian anggaran serta mempercepat pelaksanaan APBD tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut penyebab tidak tercapainya target kemantapan jalan juga disebabkan oleh kelebihan Tonase dari Truck pengangkut barang. Masalah ini kami perhatikan hampir tidak ada tindak lanjutnya , sehingga dari tahun ke tahun masalah kelebihan Tonase ini tetap muncul. Disini Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Gubernur untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Truck yang melebihi Tonase.</p>	<p>Pada tahun 2022, kemantapan jalan provinsi 71,39% dari target kemantapan jalan 75%. Namun di tahun 2023, telah di tetapkan Surat keputusan gubernur No. 620-357-2023 sehingga Panjang jalan provinsi 1.525,20 km bertambah menjadi 1.690,5 km, sehingga kemantapan provinsi pada tahun 2023 menjadi 66,09%. Menyikapi hal tersebut, dinas BMCKTR untuk kegiatan tahun 2023 melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga pada bulan maret 2023 hampir seluruh kegiatan-kegiatan sudah mulai berkontrak. Sehingga penanganan jalan rusak dapat segera di tangani. Kemudian lewat program pemerintah pusat yaitu Inpres, dinas BMCKTR telah mengusulkan 16 ruas jalan provinsi untuk ditangani dengan inpres. Proses evaluasi sedang berlangsung. Terkait kendaraan bermuatan over dimension dan over load, merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan.</p>	<p>Pada tahun 2023, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah berusaha untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, kinerja ini dapat dilihat dengan telah terkontraknya hampir keseluruhan paket pekerjaan pada bulan Maret 2023. Penangan jalan yang dapat segera ditangani ini diharapkan dapat mengoptimalkan waktu pelaksanaan dan kualitas dari setiap pekerjaan, yang kemudian nantinya dapat meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Untuk permasalahan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan bermuatan over dimension dan overload, Dinas BMCKTR pada tahun 2023 telah melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Adapun dari pembahasan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>Pada beberapa kali kesempatan forum lalu lintas dengan dinas perhubungan provinsi, telah dilaksanakan koordinasi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun saat ini hasilnya belum maksimal.</p> <p>Dinas BMCKTR tetap berusaha secara maksimal untuk terus menangani kerusakan jalan provinsi dengan menggunakan APBD yang tersedia dan sumber-sumber pembiayaan lain dari pemerintah pusat</p>	<p>tersebut, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dinas terkait ialah melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) guna membahas sumber dari permasalahan yang menyebabkan kerusakan pada jalan-jalan provinsi.</p>
6	<p>Masih stagnanya pembangunan Gedung dan bangunan strategis daerah karena berbiaya besar dan minimnya anggaran daerah, seperti Main Stadion, Gedung Budaya, Kawasan Masjid Raya, beberapa bangunan Rumah Sakit maka sangat sepatok mesti dicarikan pembiayaan di luar APBD baik melalui anggaran pusat atau pembiayaan dengan pola KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga sepanjang di ikat dengan perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan.</p>	<p>- Pemprov lebih berusaha menggaet dana pusat atau dana diluar APBD untuk pembangunan bangunan dengan biaya besar dan mencoba me follow up kembali proposal yg pernah disampaikan ke kemenpora dan pihak-pihak swasta.</p> <p>- Agar Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti ikhtisar eksekutif laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK tahun 2021, atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tahun anggaran 2020 yaitu dengan menerbitkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang komitmen penyediaan anggaran atas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang telah direncanakan.</p> <p>- Akan merancang tahapan pendanaan untuk efektivitas pembangunan yaitu tahap penyelesaian agar bisa beroperasi sementara dan tahap penyelesaian penuh.</p>	<p>Dinas BMCKTR Prov. Sumbar telah melakukan koordinasi dengan Biro Pem-Otda mengenai tindak lanjut ikhtisar eksekutif laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK tahun 2021, atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tahun anggaran 2020. Tindak lanjutnya berupa penerbitan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang komitmen penyediaan anggaran atas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang telah direncanakan. Sesuai LHP BPK RI tahun 2021, Dinas BMCKTR telah meminta bantuan Biro Pem-Otda untuk pembuatan Nota Kesepakatan melalui Surat Nomor : 640/936-CK/2023 tanggal 11 April 2023.</p>

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;

2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2022 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruan (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah menerima beberapa penghargaan sebagaimana terlampir dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Predikat Informatif Kategori OPD Provinsi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Padang, 12 Desember 2023
2	Peringkat Ke-3 (Tiga) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori OPD	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Padang, 12 Desember 2023
3	Duta Korpri	Dewan Pengurus Korpri Nasional	Stevany Dwi Djulya Rerung, S.IP.	Jakarta, 27 November 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
			(Staf Bidang Tata Ruang)	
4	Pemerintah Daerah Pengelola DAK Fisik Terbaik Semester I Tahun 2023	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Padang, 14 September 2023
5	Dukungan Dalam Bentuk Kesiagaan Penanganan Bencana di Jalan Provinsi Sumatera Barat pada Masa Lebaran Idul Fitri 1444 H/2023 M	Gubernur Sumatera Barat	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya	Padang, 30 April 2023

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.3 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Gambaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, untuk

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Satker Dinas Prasarana Jalan) Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,529,406,000,- dengan realisasi Rp. 29,645,139,000,- (97.10%)

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
I	Program Infrastruktur Konektivitas	30,129,406,000	29,253,333,000	97,09	BPJN Sumatera Barat
A	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	30,129,406,000	29,253,333,000	97,09	
1	Dukungan Teknis	75,000,000	71,470,000	95,29	
2	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	26,359,862,000	25,618,849,000	97,19	
3	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	3,694,544,000	3,563,014,000	96,44	
II	Program Dukungan Manajemen	400,000,000	391,806,000	97,95	BPJN Sumatera Barat
A	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	400,000,000	391,806,000	97,95	

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	400,000,000	391,806,000	97,95	
TOTAL		30,529,406,000	29,645,139,000	97,10	

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2023

Adapun target dan realisasi program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang diterima beserta capaian pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Target

- a) Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 2 paket
- b) Terlaksananya Pemeliharaan Preventif Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket
- c) Terlaksananya Penanganan Drainase Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi – Padat Karya sebanyak 1 paket
- d) Terlaksananya Penanganan Drainase Ruas Bukittinggi Bypass II (Jln. St. Syahrir (Sp. Lapangan Kantin) - Sp. Aur Kuning - Sp. Bypass Anak Air) – Padat Karya sebanyak 1 paket
- e) Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket
- f) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket

2. Realisasi

- a) Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 2 paket
- b) Terlaksananya Pemeliharaan Preventif Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket
- c) Terlaksananya Penanganan Drainase Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi – Padat Karya sebanyak 1 paket
- d) Terlaksananya Penanganan Drainase Ruas Bukittinggi Bypass II (Jln. St. Syahrir (Sp. Lapangan Kantin) - Sp. Aur Kuning - Sp. Bypass Anak Air) – Padat Karya sebanyak 1 paket
- e) Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket

f) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebanyak 1 paket

Untuk rincian paket pekerjaan fisik dari tugas pembantuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kegiatan /Paket Fisik Tugas Pembantuan Tahun 2023

No	Kegiatan/Output/Paket	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)	
				Keuangan	Fisik
1	Rehabilitasi Mayor Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog)	3,842,552,000	3,842,551,200	100	100
2	Rehabilitasi Minor Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog)	3,553,800,000	3,553,799,600	100	100
3	Pemeliharaan Preventif Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog)	1,545,778,000	1,545,777,500	100	100
4	Paket 1 - Penanganan Drainase Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog) – Padat Karya	3,242,198,000	3,242,197,900	100	100
5	Paket 2 - Penanganan Drainase Ruas Bukittinggi Bypass II (Jln. St. Syahrir (Sp. Lapangan Kantin) - Sp. Aur Kuning - Sp. Bypass Anak Air) (E-Catalog) – Padat Karya	9,505,104,000	9,505,103,500	100	100
6	Pemeliharaan Jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog)	2,274,355,000	2,274,353,200	100	100
7	Pemeliharaan Berkala Jembatan Kota Padang dan Kota Bukittinggi (E-Catalog)	3,131,420,000	3,131,416,900	100	100
Total		27,095,207,000	27,095,199,800	100	100

4.4 HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, tim SKPD Dinas BMCKTR dapat melaksanakan semua paket

kegiatan tanpa menghadapi permasalahan (nihil), baik di lapangan ataupun pada kelengkapan administrasi pekerjaan.

b. Upaya Penyelesaian

Tidak terdapat pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan cukup optimal. Kinerja ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian

LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.